

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN
KONSEP *BLUE ECONOMY* DAN *GREEN
ECONOMY* DI WILAYAH PESISIR**

**Penulis:
Misdawita
Putri Asrina
M. Rizwan**



GETPRESS INDONESIA

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
PENERAPAN KONSEP *BLUE ECONOMY* DAN
GREEN ECONOMY DI WILAYAH PESISIR**

Penulis : Misdawita

Putri Asrina

M. Rizwan

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari, ME.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah

Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya Peneliti telah dapat menyelesaikan buku “Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Penerapan Konsep *Blue Economy* Dan *Green Economy* Di Wilayah Pesisir”. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian melalui literatur review dan penelitian langsung di lapangan mengenai *Blue Economy* Dan *Green Economy* Di Wilayah Pesisir.

Buku ini dibuat sebagai respons atas maraknya isu-isu dari berbagai pihak dan kalangan tentang *Blue Economy* Dan *Green Economy* Di Wilayah Pesisir yang memiliki potensi besar pada saat ini. Selain itu, bagaimana *Blue Economy* Dan *Green Economy* dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Buku ini berusaha untuk bagaimanapun penerapan konsep *Blue Economy* Dan *Green Economy* dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan di Wilayah Pesisir. Dengan konsep *Blue Economy* Dan *Green Economy* yang mereka terapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah pesisir.

Saya berharap buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait *Blue Economy* Dan *Green Economy* Di Wilayah Pesisir.

Akhir kata, Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Peneliti melalui penerbitan buku ini dapat terwujud. Saya berharap melalui buku ini dapat mengoptimalkan peran *Blue Economy* Dan *Green Economy* di Indonesia khususnya di wilayah pesisir.

Pekanbaru, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	6
BAB III KONDISI UMUM MASYARAKAT PESISIR	13
BAB IV <i>BLUE ECONOMY</i> (EKONOMI BIRU).....	23
BAB V <i>GREEN ECONOMY</i> (EKONOMI HIJAU)	29
BAB VI <i>STRUCTURAL EQUATION MODEL-PARTIAL LEAST SQUARE (SEM-PLS)</i>	36
6.1 Definisi SEM-PLS.....	36
6.2 Syarat SEM-PLS digunakan.....	38
6.3 Measurement Model dan Outer Model	41
6.4 <i>Inner Model</i>	46
BAB VII PENGARUH PENERAPAN KONSEP <i>BLUE ECONOMY</i> TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT WILAYAH PESISIR.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	66
INDEKS	73
GLOSARIUM	75
PROFIL PENULIS.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai negara maritim karena menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan garis pantai 95.181 km, luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta km². Hal ini seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan sumber daya alam yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama penduduk pesisir (Kamal et al., 2023). Namun pada kenyataannya, tingkat kemiskinan di wilayah pesisir masih sangat tinggi, dengan poverty headcount index (PHI) mencapai 9,57% (BPS, 2021). Wilayah pesisir masih identik dengan permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir menjadi kajian yang penting dalam pengembangan wilayah pesisir (Misdawita, 2023).

Meskipun demikian, tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial masih menjadi kenyataan di masyarakat pesisir. Di wilayah pesisir, terdapat sejumlah permasalahan ekonomi yang perlu ditangani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Novianti & Maria, 2019). Beberapa permasalahan tersebut melibatkan aspek-aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan, seperti: ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses keuangan, tantangan sektor pertanian, kerentanan terhadap perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada sektor tertentu, dan kurangnya diversifikasi ekonomi (Bhinadi, 2017). Dalam menghadapi kompleksitas isu ini, konsep *blue economy*, dan *green economy* menjadi fokus perhatian sebagai solusi berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat (Zainul Bahri et al., 2023).

Wilayah pesisir, dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, memiliki peluang besar dalam menerapkan konsep *blue economy* (Y. A. Wahyuddin et al., 2022). Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pengembangan pariwisata laut, dan diversifikasi ekonomi melalui sektor kelautan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan masyarakat pesisir. Konsep *blue economy* menyatakan tentang peluang besar yang ada pada lautan dan pantai dalam kegiatan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Namun, penting juga untuk menemukan solusi terhadap tantangan yang terkait dengan lautan dan sumber daya alam, seperti penangkapan ikan yang berlebihan, pencemaran laut, kerusakan habitat, serta dampak perubahan iklim. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan dan pendekatan yang inovatif, negara-negara dapat memanfaatkan potensi

ekonomi dari sumber daya laut mereka sambil tetap menjaga keseimbangan ekosistem laut. (Tegar & Saut Gurning, 2018). Konsep *Blue Economy* telah menjadi salah satu paradigma ekonomi regional yang paling umum diterapkan di wilayah pesisir di seluruh dunia dengan cepat. Konsep *blue economy* menawarkan peluang baru untuk menopang pembangunan ekonomi regional dan berpotensi mendukung transisi ke sektor *blue economy* (Graziano et al., 2019).

Blue economy dapat menciptakan peluang ekonomi baru di sektor perikanan, pariwisata, transportasi maritim, energi terbarukan, dan industri lainnya yang terkait dengan sumber daya laut. Ini dapat menghasilkan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat (Puspitasari et al., 2023). Pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Pendapatan tambahan dari sektor *blue economy* dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur lainnya (Humairoh et al., 2024). Selain itu *blue economy* dapat memberdayakan komunitas pesisir dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan sumber daya laut. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka (Wijayanti & Ramlah, 2022).

Selain konsep *blue economy*, konsep *green economy* menjadi pelengkap dalam konteks pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir. Investasi dalam energi terbarukan, praktik-produksi yang ramah lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nugraha et al., 2024).

Penerapan *green economy* membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan pesisir, termasuk pengurangan polusi air, perlindungan ekosistem, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam (Zainul Bahri et al., 2023). Dengan meminimalkan dampak lingkungan, *green economy* berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir, udara dan air yang bersih, keberlanjutan ekosistem, dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam akan mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, melibatkan masyarakat pesisir dalam praktik-praktik *green economy* dapat meningkatkan pemberdayaan mereka. Pelatihan dan pendidikan terkait praktik-praktik ramah lingkungan dapat membantu

masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya dalam mengelola sumber daya alam (Seftiani, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, maka melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi secara spesifik dampak penerapan kedua konsep tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan dan dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa penelitian empiris tentang dampak penerapan konsep *blue economy*, dan *green economy* wilayah pesisir masih sangat terbatas dan sebagian besar studi empiris yang ada meneliti dampak masing-masing konsep terhadap pembangunan ekonomi dan tingkat kemiskinan secara agregat, namun mengabaikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara individual (mikro). Oleh karena ini penelitian ini akan berkontribusi untuk mengkaji efek interaktif antara *blue economy* dan *green economy* terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dalam konteks mikro ekonomi.

BAB II

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan mereka disebut kesejahteraan. Namun, tingkat kesejahteraan itu sendiri adalah sesuatu yang relatif karena tergantung pada seberapa besar kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Mokalu et al., 2021). Dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, seseorang dianggap sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung berkorelasi dengan indikator kesejahteraan (Rahmasari, 2017).

Kesejahteraan adalah penghidupan sosial dan tata kehidupan. Material dan spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri, rumah tangga, dan masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Husna, 2014).

Menurut Sunart (2012) kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, dan spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial mereka untuk diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Syahrin et al., 2022). Indikator kesejahteraan masyarakat mencakup lima komponen utama, yaitu:

1. Kepentingan masyarakat
2. Kebutuhan terpenuhi
3. Kesatuan sosial
4. Keamanan
5. Keselamatan

Tingkat kesejahteraan juga dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya pangan, sandang dan Kesehatan (Sebayang, 2018). Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain (Larasati & Winarno, 2023):

1. Tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat
2. Tingkat pendidikan masyarakat
3. Tingkat kesehatan masyarakat
4. Kebijakan dan alokasi dana desa

Peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor tersebut terbukti berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pembangunan dan pengembangan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan terwujudnya rasa aman, tenteram serta keadilan, diharapkan setiap warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri untuk melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik (Wirata, 2022).

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitanya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerja dan hak-hak sipil. Pada tahun 1990-an terjadi perubahan lagi, Mahbub Ul-Haq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan *Human Development Index* (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial individu. HDI merupakan gabungan dari tiga komponen,

yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan per kapita (Sardar & Hr, 2016)

Di antara aspek yang sering digunakan sebagai indikator ukuran kesejahteraan adalah pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, Faktor-faktor yang paling mempengaruhi kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai aspek yang saling terkait (Syahrin et al., 2022). Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat diidentifikasi:

a. Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan. Kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas, sedangkan masalah kesehatan dapat menghambat kemampuan individu untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan berhubungan langsung dengan kemampuan individu dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan. Pendidikan yang lebih tinggi biasanya berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas.

c. Pendapatan dan Daya Beli

Pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat adalah indikator penting dari kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Ketersediaan Infrastruktur

Akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi berpengaruh besar terhadap kualitas hidup. Infrastruktur yang baik mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

e. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang mendukung pengeluaran di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan sangat penting. Alokasi anggaran yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan yang diperlukan.

f. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan pendapatan, dan stabilitas sosial juga mempengaruhi kesejahteraan. Masyarakat yang hidup dalam kondisi sosial yang stabil cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

g. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan juga berkontribusi pada kesejahteraan. Keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka dan sosial budaya.

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program, antara lain:

1. Menyediakan infrastruktur dasar yang memadai
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan
3. Menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi
4. Menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Melindungi lingkungan dan sumber daya alam
6. Menjamin pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Dengan menggunakan indikator yang tepat dan didukung oleh peran aktif pemerintah, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan secara

berkelanjutan (Wirata, 2022). Terlepas dari fakta bahwa tidak ada batasan substansial yang jelas untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan, tingkat kesejahteraan mencakup hal-hal seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, dan seringkali meluas ke perlindungan sosial lainnya, seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, dan keterbebasan dari kemiskinan, antara lain. Sepuluh indikator digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan: umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan perawatan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke sekolah, dan akses ke fasilitas (Larasati & Winarno, 2023).

BAB III

KONDISI UMUM MASYARAKAT PESISIR

Pesisir adalah tempat di mana lautan dan daratan berkumpul. Di sisi darat, bagian daratan, baik kering maupun terendam air, masih dipengaruhi oleh sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Di sisi laut, bagian daratan termasuk bagian laut yang masih terkena dampak dari proses alami di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, serta akibat aktivitas manusia di darat seperti penggundulan dan pencemaran hutan (Ridlo & Yuliani, 2018).

Di daerah pesisir ini, terdapat masyarakat yang bertempat tinggal dan memenuhi kebutuhannya. Biasa disebut dengan masyarakat pesisir. Masyarakat Pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan (Nur, 2019). Melihat karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir, khususnya fakta bahwa sebagian besar masyarakat pesisir bermata pencaharian di wilayah tersebut, masyarakat pesisir pantai sangat bergantung pada potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir, dan transportasi laut

kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut (Mariana, 2023).

Hal yang menarik adalah bahwa bagi masyarakat pesisir, tinggal dekat pantai adalah sesuatu yang sangat diinginkan, karena mereka dapat menikmati berbagai kemudahan dalam berbagai aktivitas sehari-hari (Wahyudin, 2003). Kemudahan tersebut seperti kemudahan aksesibilitas dari dan ke sumber mata pencaharian lebih terjamin, mengingat sebagian masyarakat pesisir menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan potensi perikanan dan laut yang terdapat di sekitarnya, seperti penangkapan ikan, pengumpulan atau budidaya rumput laut, dan sebagainya. Kedua, kemudahan mendapatkan kebutuhan akan MCK (mandi, cuci dan kakus).

Banyak aspek kehidupan masyarakat pesisir yang tidak diketahui orang luar. Mereka juga termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan dalam posisi marginal. Mereka memiliki pengetahuan, keyakinan, dan peran sosial dan strukturnya sendiri. Masyarakat pesisir memiliki sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang khas dan unik. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha di bidang perikanan itu sendiri. Karena usaha-usaha perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, musim,

dan pasar, maka karakteristik masyarakat pesisir juga terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut (Intyas et al., 2022).

Selanjutnya, dikatakan pula bahwa masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogen. Masyarakat pesisir terbentuk dari kelompok-kelompok sosial yang beragam. (Wahyudin, 2003). Masyarakat pesisir memiliki karaktes sosial ekonomi sebagai berikut:

1. Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir.

Karakteristik sosial masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti jumlah keluarga, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan keluarga, dan keadaan lingkungan.

2. Karakteristik Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Karakteristik Ekonomi masyarakat dapat dilihat dari: modal, tingkat pendapatan, pemasaran, dan upah harian (Lolowang et al., 2022).

Keberlanjutan dan keberhasilan usaha perikanan sangat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya air, yang berdampak besar pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Misalnya, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir sangat bergantung pada lingkungannya dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, terutama pencemaran. Limbah industri dan tumpahan minyak dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat

pesisir. Produksi udang tambak, contohnya, telah turun drastis akibat pencemaran pantai Jawa beberapa waktu lalu. Kehidupan para petani tambak akan sangat dipengaruhi oleh hal ini (Sabarisman, 2017).

Ketergantungan pada musim juga menjadi ciri khas masyarakat pesisir, terutama nelayan. Para nelayan kecil semakin bergantung pada musim ini. Pada musim penangkapan, nelayan sangat sibuk melaut. Sebaliknya, kegiatan melaut berkurang pada musim peceklik, yang menyebabkan banyak nelayan menganggur. Kondisi ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan, terutama yang bekerja sebagai nelayan. Kehidupan mereka menjadi lebih buruk ketika pendapatan mereka menurun drastis selama musim paceklik (Wahyudin, 2003).

Pendapatan nelayan biasanya sangat berubah dari hari ke hari. Dalam satu hari, Anda mungkin mendapatkan tangkapan yang sangat tinggi, tetapi pada hari berikutnya, Anda mungkin "kosong". Jumlah nelayan yang beroperasi di daerah penangkapan (fishing ground) sangat memengaruhi hasil tangkapan, dan pada gilirannya pendapatan nelayan. Misalnya, kelebihan tangkap telah terjadi di wilayah yang padat penduduknya, seperti pantai utara Jawa. Hal ini

menyebabkan volume hasil tangkapan nelayan berkurang, yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan mereka.

Masyarakat pantai juga harus mempertimbangkan aktivitas wanita dan anak-anak. Anak-anak dan wanita biasanya bekerja untuk mencari nafkah di masyarakat ini. Wanita, baik orang tua maupun anak-anak, sering bekerja sebagai pengencer ikan, menjual ikan segar maupun ikan olahan. Selain itu, mereka mengolah ikan, baik dalam skala kecil di rumah untuk dijual sendiri maupun sebagai karyawan di perusahaan pengolahan ikan. Namun, anak laki-laki biasanya sudah terlibat dalam kegiatan melaut. Ini adalah faktor utama yang menyebabkan sejumlah besar anak-anak nelayan tidak memiliki akses ke pendidikan formal (Misdawita & Utami, 2022).

Ketergantungan pada pasar adalah ciri lain dari usaha perikanan masyarakat pesisir ini. Tidak seperti petani padi, petani dan nelayan ini sangat bergantung pada kondisi pasar. Hal ini disebabkan karena komoditas yang mereka hasilkan harus dijual sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika petani padi tradisional bisa hidup tanpa menjual produknya atau hanya menjual sedikit, maka nelayan dan petani tambak harus menjual sebagian besar hasilnya. Petani tambak dan nelayan tradisional, apapun

ukurannya, harus menjual sebagian besar hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Wahyudin, 2003).

Pada umumnya masyarakat pesisir menghadapi beberapa tantangan sosial ekonomi yang harus selalu mereka hadapi, antara lain:

1. Kemiskinan dan Ketergantungan pada Sumber Daya Pesisir

Masyarakat pesisir sering berada dalam kondisi kemiskinan karena ketergantungan mereka pada sumber daya laut yang tidak menentu. Pekerjaan sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan penambangan pasir seringkali berisiko tinggi dan tidak stabil, sehingga pendapatan mereka dapat berfluktuasi (Purba, 2002).

2. Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan yang terbatas dapat mempengaruhi keterampilan dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan (Larasati & Winarno, 2023).

3. Kondisi Lingkungan yang Buruk

Degradasi lingkungan pesisir disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, perusakan habitat biota laut, dan

pencemaran polusi plastik. Hal ini tidak hanya merusak ekosistem pesisir tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan dan kelangsungan hidup nelayan (Nasution, 2013).

4. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Masyarakat pesisir sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, seperti akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur transportasi. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka (Wahyudin, 2003).

5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan yang Kurang Efektif

Pembangunan wilayah pesisir seringkali dihadapkan pada permasalahan kebijakan dan strategi yang kurang efektif. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan (Resta Setyawati et al., 2019).

6. Peran Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Peran wanita dalam masyarakat pesisir sangat penting dalam menstabilkan ekonomi rumah tangga nelayan. Wanita sering bekerja sepanjang tahun untuk mendukung keluarga mereka, sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Wanita-wanita di daerah pesisir memiliki kemampuan sebagai penggerak pemberdayaan

penduduk di daerah tersebut. Dalam perihal ini, wanita adalah anggota rumah tangga yang mempunyai kemampuan dalam menyokong pemasukan keluarga (Setyawati & Ningrum, 2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi peran wanita dan penguatan ekonomi rumah tangga daerah pesisir adalah tingkat pendidikan dan pendapatan suami (Misdawita, 2023).

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, seperti memberikan modal usaha dan bantuan pinjaman dengan bunga rendah. Selain itu, dengan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) juga dapat bermanfaat guna meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan memperbaiki kualitas hidup mereka (Mariana, 2023).

Selain itu, pemerintah harus mengelola sumber daya alam pesisir secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif kegiatan industri dan pembangunan. Hal ini termasuk strategi pengelolaan sumber daya laut yang efektif. Pengelolaan wilayah pesisir harus didasarkan pada tiga aspek: ekologi, sosial ekonomi, dan kelembagaan. Penataan zona pemanfaatan dan perlindungan lingkungan sangat

penting untuk melestarikan fungsi ekologis dan ekonomis wilayah pesisir (Dahuri, 2001).

Pemerintah harus memperbaiki jaringan transportasi dan akses ke pasar untuk mempermudah distribusi hasil-hasil pertanian dan perikanan, sehingga meningkatkan potensi ekonomi lokal. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga lingkungan. Pemerintah harus memberikan dukungan pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan (Larasati & Winarno, 2023).

Pemerintah harus mengembangkan kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosial ekonomi, dan kelembagaan. Hal ini termasuk penerapan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) untuk mengurangi dampak bencana dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Pemerintah harus mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk

memastikan bahwa kebijakan dan strategi pembangunan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat pesisir. Pertemuan rutin yang melibatkan semua pihak terkait sangat penting untuk memberikan masukan yang bersifat membangun dan membimbing masyarakat dalam memahami pentingnya pengelolaan ekonomi yang efektif (Pramudyanto, 2014).

BAB IV

***BLUE ECONOMY* (EKONOMI BIRU)**

Ekonomi biru, juga dikenal sebagai "*Blue Economy*", adalah jenis ekonomi laut yang berkelanjutan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial sambil mempertahankan kelestarian lingkungan (World Bank & UN DESA, 2017). Konsep "*Blue Economy* " mengacu pada penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Mengingat dampaknya terhadap sumber daya laut, konsep ini menekankan hubungan antara kegiatan sektoral dan permintaan untuk pendekatan manajemen terpadu, seperti perencanaan tata ruang laut untuk mengelola trade-off lintas sektor, konsultasi dan peningkatan data dengan berbagai stakeholder, penghitungan modal alam untuk menentukan dan mengkomunikasikan nilai sumber daya alam, dan "pembiayaan biru" atau "*blue financing* "(Hutajulu et al., 2024).

Konsep ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya perairan dengan cara yang inovatif dan kreatif, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ciri-ciri utama *Blue Economy*:

1. Pendekatan Berkelanjutan. *Blue economy* menekankan perlunya menjaga sumber daya laut agar tetap lestari dan tidak dieksploitasi secara berlebihan.
2. Pengelolaan Terpadu. Konsep ini mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dalam pengelolaan sumber daya laut.
3. Inovasi dan Teknologi. *Blue economy* mengintegrasikan pengetahuan dan teknologi terbaru untuk menciptakan solusi baru dalam memanfaatkan potensi ekonomi laut.
4. Pro-Ekosistem. Kegiatan dalam blue economy harus mendukung ekosistem, dengan pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan (Tegar & Saut Gurning, 2018).

Pengembangan *Blue Economy* di Indonesia berperan dalam mendukung Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pencantuman tujuan khusus untuk lautan (SDG 14) menyoroti semakin diakuinya pentingnya lautan dalam kebijakan global. Bagi negara kepulauan, lautan menopang seluruh agenda pembangunan berkelanjutan mereka, dengan keterkaitan antara SDG 14 dan tujuan lain

yang menangani kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), pendidikan berkualitas (SDG 4), energi bersih dan terjangkau (SDG 7), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (SDG 8), industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9), pengurangan kesenjangan (SDG 10), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), adaptasi terhadap dampak perubahan iklim (SDG 13), dan lain-lain (Y. A. Wahyuddin et al., 2022).

Karena Indonesia adalah negara maritim, konsep ekonomi biru bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan serta menjaga kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir dan laut (Prayuda, 2019). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 km, Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam laut yang melimpah, yang menopang berbagai macam kelautan dan menghadirkan prospek yang cukup besar bagi pembentukan sektor-sektor baru yang sedang berkembang. Perairan Indonesia menawarkan peluang ekonomi di berbagai sektor, termasuk sumber daya hayati dan nonhayati laut, industri, pariwisata, transportasi, dan logistic (Dian et al., 2023). *World Bank* memperkirakan ekonomi kelautan Indonesia memiliki nilai tahunan lebih dari USD280 miliar, dengan pembangunan dan manufaktur kelautan menjadi dua sektor utama. Pariwisata terumbu

karang saja bernilai USD3 miliar di negara ini, yang dikenal karena kekayaan karangnya. Produksi perikanan tangkap laut memiliki surplus perdagangan sebesar USD4,12 miliar pada tahun 2018, yang mengisyaratkan permintaan substansial dari pasar internasional (Susmoro, 2019).

Pembangunan *Blue Economy* di Indonesia sangat penting untuk transformasi ekonomi dan keluar dari perangkap pendapatan menengah. Visi Indonesia 2045 menyerukan transformasi ekonomi dari ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis manufaktur dan jasa yang modern dan kompetitif dengan nilai tambah tinggi untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Transformasi ekonomi akan memanfaatkan kekuatan maritim negara ini dengan menggabungkan pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik untuk memanfaatkan pembangunan ekonomi biru guna meningkatkan keberlanjutan lingkungan serta membangun sektor maritim yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi diharapkan dapat membantu meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, dan nilai tambah (Wati et al., 2024).

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) dikembangkan dengan dukungan dari ARISE+ Indonesia pada tahun 2022 dengan tujuan untuk menyediakan alat pemantauan guna

mengukur kemajuan implementasi ekonomi biru di berbagai daerah di Indonesia. IBEI terdiri dari tiga pilar SDGs yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk mendukung beberapa aspek SDGs, yang diuraikan sebagai berikut (BAPPENAS, 2023):

1. Pilar ekonomi mencakup kontribusi sektor kelautan (perikanan dan akuakultur, manufaktur berbasis kelautan, dan pariwisata) terhadap perekonomian Indonesia. Pilar ini mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).
2. Pilar lingkungan hidup membahas kualitas ekosistem pesisir dan laut yang akan menjadi proksi bagi ekonomi laut yang berkelanjutan. Lingkungan yang terpelihara dengan baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang layak. Pilar ini mendukung beberapa SDG, seperti SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDG 13 (Aksi Iklim), SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air).
3. Pilar sosial berfokus pada inklusivitas. Pilar ini mengukur bagaimana sektor kelautan dapat mendukung terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kesejahteraan mencakup pendapatan dan kualitas hidup (perawatan kesehatan). Pilar ini mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kesehatan

dan Kesejahteraan yang Baik), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan).

Secara umum, IBEI memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. IBEI berfungsi sebagai instrumen untuk memantau kinerja sektor ekonomi biru sebagai aset untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju pencapaian visi Indonesia 2045.
- b. IBEI yang dibangun berdasarkan dashboard indikator ekonomi makro terpilih menyoroti kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan Indonesia yang terkait dengan sektor ekonomi biru. Kebijakan khusus kemudian dapat ditetapkan untuk memenuhi tingkat pembangunan tertentu untuk setiap indikator.
- c. IBEI mendorong koordinasi yang lebih baik di antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam sektor ekonomi biru, seperti perikanan, pariwisata, manufaktur berbasis kelautan, konservasi laut, jasa maritim, energi, penelitian, dan pendidikan.
- d. IBEI juga dapat memberikan wawasan tentang provinsi mana yang menjadi fokus untuk mengatasi masalah ketimpangan atau target kebijakan lainnya.

BAB V

***GREEN ECONOMY* (EKONOMI HIJAU)**

Green economy, atau ekonomi hijau, adalah sebuah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Seiring dengan perubahan dunia akibat evolusi teknologi, iklim, politik, dan ekonomi, terdapat praktik-praktik yang saling terkait yang secara positif menyeimbangkan tujuan lingkungan dan sosial demi kebaikan alam, warga negara, dan bisnis. *Green economy* adalah model ekonomi yang mengutamakan keberhasilan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (Anwar, 2022).

Green economy didefinisikan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) sebagai sebuah sistem yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, serta secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. UNEP menekankan bahwa pelestarian sumber daya alam penting termasuk sumber daya dan ekosistem di dalamnya. (Makmun, 2020).

Dalam prakteknya, *green economy* tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Kualitas lingkungan mengalami penurunan yang semakin parah akibat aktivitas industri menimbulkan perhatian yang lebih besar terhadap upaya menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dan kualitas lingkungan, yang merupakan tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri terdiri dari tiga komponen utama, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial (Zahari & Sudirman, 2017).

Ketiga komponen pembangunan berkelanjutan saling terkait dan saling bergantung dalam berbagai cara. Ekonomi suatu negara, khususnya negara berkembang, harus memperhatikan ketiga elemen tersebut dalam proses perkembangannya. Komponen ekonomi perlu mempertimbangkan dua komponen lainnya. Aspek lingkungan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan. Di sisi lain, kesejahteraan manusia yang adil didorong oleh elemen sosial. Oleh karena itu, tujuan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada pihak yang memahami pentingnya mengintegrasikan ketiga komponen tersebut. Karena manusia akan menentukan arah dan keberlanjutan agenda pembangunan berkelanjutan, mereka menjadi komponen kunci dalam proses pengembangan ini (Zahari & Sudirman, 2017).

Green economy mendorong perekonomian menjadi lebih berkelanjutan dan rendah karbon, serta memastikan sumber daya alam terus menyediakan kekayaan dan layanan lingkungan untuk kesejahteraan kita yang berkelanjutan. Fokus *green economy* yaitu tentang kemajuan kesejahteraan manusia dapat dicapai tanpa menyebabkan kerusakan, menghabiskan sumber daya alam atau merusak lingkungan kita (Nugraha et al., 2024). Prinsip-prinsip konsep *Green economy* menurut UNEP, adalah sebagai berikut:

- a. Menghargai dan menginvestasikan pada sumber daya alam
- b. Mengurangi kemiskinan
- c. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesetaraan sosial,
- d. Mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan energi terbarukan dan rendah emisi.

Green economy mencakup setidaknya sebelas sektor, seperti pertanian, konstruksi, kota, energi, perikanan, kehutanan, manufaktur pengolahan dan pembuatan, pariwisata, transportasi, limbah, dan air. Kesebelas bidang ini terdiri dari sangat penting untuk mengidentifikasi ekonomi negara yang ramah lingkungan. Beragam inisiatif yang berfokus pada ekonomi mulai muncul untuk menangani masalah lingkungan, termasuk penetapan harga karbon dan kebijakan industri (Mubarok, 2023).

Carbon price merupakan adalah biaya yang jelas untuk eksternalitas emisi karbon yang ditetapkan oleh pemerintah dan dibayarkan oleh pihak yang menghasilkan polusi. Penetapan harga yang jelas untuk karbon akan meningkatkan biaya barang-barang yang menghasilkan emisi karbon tinggi, seperti produksi bahan bakar fosil, besi, baja, dan sejenisnya. (Aisyah et al., 2020). Penerapan dari carbon price memiliki tujuan sebagai berikut:

1. menekan emisi karbon
2. mendorong pengembangan inovasi yang ramah lingkungan
3. meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan lainnya.

Pendapatan tambahan yang dihasilkan dari penerapan harga karbon dapat digunakan dengan tujuan yang produktif/ untuk meningkatkan distribusi fiskal yang adil dan bermanfaat bagi rumah tangga secara keseluruhan. Di sisi lain, energi terbarukan dan produk dengan emisi rendah akan menjadi lebih kompetitif, yang pada akhirnya akan mendorong inovasi ramah lingkungan dan mendukung pengurangan emisi (Southgate & Disinger, 2019).

Pengembangan *green economy* juga harus didukung oleh serangkaian kebijakan industri yang bagus. Kebijakan industri ini dapat dipelajari dari praktik kebijakan *green industry* di Korea Selatan dan Uni Eropa, yang lebih fokus

pada sektor perdagangan, investasi dan industri. Kebijakan *green industry* harus berlandaskan pada tujuan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini memerlukan partisipasi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha secara berkesinambungan (Kalinowski, 2021).

Menurut Global Green Growth Institute, beberapa faktor penting yang mendorong pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah sebagai berikut. Pertama, efisiensi dan manajemen sumber daya alam yang baik penting untuk kemakmuran ekonomi. Kedua, investasi infrastruktur rendah karbon untuk mendorong pertumbuhan ekonomi modern. Ketiga, menstimulasi inovasi dan investasi sektor swasta. Keempat, fokus pada sumber daya manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan. Kelima, mengatasi kegagalan pasar dalam mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan (GGGI, 2015).

Tantangan terbesar dalam menerapkan *green economy* di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama, yaitu:

1. Literasi Masyarakat

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep ekonomi hijau. Hal ini membuat sulit

untuk membangun dukungan masyarakat yang luas dan mendalam untuk transisi ke ekonomi hijau.

2. Pembiayaan

Biaya pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi hijau sangat mahal. Contohnya, Mengubah energi batubara menjadi energi terbarukan memerlukan biaya yang signifikan untuk pembangunan dan pemeliharaan.

3. Ketergantungan pada Batubara:

Ketergantungan Indonesia pada batubara masih tinggi. Aktivitas tambang batubara hingga 2023 akhir masih tinggi, dan produksi batubara tahun 2023 melebihi target yang dicanangkan. Hal ini membuat pelaksanaan ekonomi hijau yang inklusif di Indonesia tersendat.

4. Perubahan Paradigma

Perlu adanya perubahan paradigma dari ekonomi konvensional ke ekonomi hijau. Hal ini memerlukan kesadaran dan partisipasi publik yang lebih tinggi, serta kebijakan yang mendukung.

5. Kesulitan dalam Mengukur Kemajuan

Indonesia membutuhkan indikator makro yang tepat untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau.

Indikator seperti "Inclusive Wealth" dan "Green GDP" diperlukan untuk membangun jalur menuju pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan kompetitif secara ekonomi.

6. Kebijakan yang Konsisten

Kebijakan yang mendukung, terkoordinasi, dan konsisten sangat penting untuk mendorong investasi dan kemajuan dalam ekonomi hijau yang berkelanjutan. Kebijakan yang memiliki peraturan yang jelas dan insentif dapat mendorong perubahan menuju ekonomi hijau (Hayati & Anggadha Ratno, 2019).

Dengan demikian, tantangan utama dalam menerapkan ekonomi hijau di Indonesia melibatkan aspek literasi masyarakat, biaya pembangunan, ketergantungan pada batubara, perubahan paradigma, kesulitan dalam mengukur kemajuan, dan kebijakan yang konsisten (Nugraha et al., 2024).

BAB VI

STRUCTURAL EQUATION MODEL- PARTIAL LEAST SQUARE (SEM-PLS)

6.1 Definisi SEM-PLS

"Analisis multivariat" adalah metode statistik yang mengevaluasi banyak variabel secara bersamaan (Hair Jr et al., 2021). Untuk generasi kedua analisis multivariat, digunakan *Structural Equation Model (SEM)*. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memasukkan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat diukur melalui variabel laten atau indikator secara tidak langsung (Chin & Dibbern, 2009).

SEM dalam analisis data yang bersifat konfirmasi teori (*confirmatory*) menggunakan metode *Covariance-based Structural Equation Modeling (CB-SEM)*, selalu mempersyaratkan asumsi seperti teori yang cukup mendukung, jumlah sampel yang besar, dan data yang terdistribusi normal. Namun, dalam kenyataannya, para peneliti sering menghadapi masalah-masalah tersebut. Untuk memecahkan masalah tersebut di dalam SEM generasi kedua,

telah dikembangkan metode analisis menggunakan *Partial Least Square (PLS)* (Wibisono et al., 2015).

Partial Least Square (PLS) dapat diterapkan pada sampel yang berukuran kecil, meskipun jumlah sampel yang lebih besar akan meningkatkan presisi estimasi. PLS tidak memerlukan asumsi bahwa distribusi data harus normal. Bentuk konstruk dapat menggunakan model reflektif atau formatif. Selain itu, jumlah indikator maksimum yang dapat digunakan juga cukup besar, yaitu hingga 1000 indikator. (Hair Jr et al., 2021). PLS dapat diolah dengan menggunakan software seperti SmartPLS, Warp PLS, Tetrad, PLS-PM dan sebagainya.

Structural Equation Model (SEM) mempunyai dua tujuan utama, yaitu:

1. Membantu memahami pola korelasi/kovarians antar variabel dan
2. Menjelaskan variannya sebanyak mungkin dengan model yang ditentukan

Structural Equation Model sangat kompleks karena mengandung banyak koefisien dalam banyak arah dan diagram adalah cara terbaik untuk memahami apa yang dilakukan oleh *Structural Equation Model*. *Structural Equation Model* sering mengikuti beberapa symbol-simbol umum, yaitu:

1. Variabel laten dilambangkan dengan lingkaran
2. Variabel terukur dilambangkan dengan kuadrat
3. Hubungan dilambangkan dengan panah
4. Varians dan residual dilambangkan dengan panah dari variabel ke dirinya sendiri (Rahadi, 2023).

6.2 Syarat SEM-PLS digunakan

Model SEM-PLS memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan secara bersamaan dalam model kompleks yang terdiri dari beberapa konstruksi, variabel indikator, dan jalur struktural. Model SEM-PLS menjadi metode yang populer untuk memperkirakan model jalur dengan variabel laten dan hubungannya (Sarstedt et al., 2014).

Keuntungan SEM-PLS meliputi kemampuan untuk memodelkan banyak variabel dengan tingkat signifikansi yang lebih tinggi; mengatasi masalah multikolinieritas pada dataset yang besar; kuat dalam menangani masukan hilang dan tidak lengkap; dan dapat memajukan penyebab laten dengan lebih maju berdasarkan muatan silang yang terkait dengan penyebab respons, menghasilkan hipotesis yang lebih kuat.

Partial Least Squares (PLS) dalam Structural Equation Modeling (SEM) memiliki beberapa syarat dan

karakteristik yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa syarat dan karakteristik utama SEM-PLS:

1. Ukuran Sampel

Ukuran sampel yang digunakan dalam SEM dengan PLS dapat relatif kecil, minimal 10 kali dari jumlah indikator formatif terbanyak yang ada dalam model. Hal ini memungkinkan PLS untuk digunakan dalam situasi di mana ukuran sampel data kecil.

2. Data Distribusi

PLS tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal multivariat. Oleh karena itu, PLS dapat digunakan dengan data yang tidak memiliki distribusi normal.

3. Kompleksitas Model

PLS sangat cocok untuk model struktural yang relatif kompleks, yang mencakup banyak konstruk dan indikator. Hal ini karena PLS dapat menangani model yang kompleks dengan lebih baik daripada SEM berbasis kovarian.

4. Penggunaan Indikator:

PLS dapat menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif secara bersamaan. Hal ini memungkinkan PLS untuk digunakan dalam situasi di mana model pengukuran formatif digunakan.

5. Algoritma Iteratif

PLS menggunakan algoritma iteratif yang terdiri dari beberapa analisis dengan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Squares). Hal ini memungkinkan PLS untuk menangani masalah identifikasi yang tidak penting dan solusi model yang tidak dapat diterima.

6. Penggunaan SmartPLS

SmartPLS adalah software yang populer digunakan untuk melakukan analisis SEM dengan PLS. SmartPLS dapat menguji model SEM formatif dan reflektif dengan skala pengukuran indikator berbeda dalam satu model. Selain itu, SmartPLS juga dapat menilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk indikator-indikator yang digunakan (Ghozali, 2014).

Dengan demikian, PLS-SEM merupakan alternatif yang efektif untuk mengatasi keterbatasan analisis regresi dengan teknik OLS, terutama dalam situasi di mana ukuran sampel data kecil dan model struktural yang kompleks digunakan.

6.3 Measurement Model dan Outer Model

Measurement Model pada SEM PLS adalah bagian dari Structural Equation Modeling (SEM) yang bertujuan untuk menghubungkan variabel laten dengan indikator-indikator

yang digunakan untuk mengukurnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari measurement model pada SEM PLS:

1. Indikator Reflektif dan Formatif

Indikator reflektif dianggap merefleksikan atau merepresentasikan konstruk laten. Hubungan kausalitasnya dari variabel laten ke indikator.

Indikator Formatif: Indikator formatif dianggap membentuk konstruk laten. Hubungan kausalitasnya dari indikator ke variabel laten.

2. Pengukuran Validitas dan Reliabilitas

Indikator reflektif harus memiliki nilai loading faktor yang tinggi ($> 0,7$) untuk menunjukkan validitas konvergen. Indikator reflektif dengan nilai di bawah 0,4 biasanya dianggap tidak valid dan perlu dihilangkan

3. Average Variance Extracted (AVE)

Nilai AVE yang diharapkan lebih dari 0,5 menunjukkan bahwa konstruk laten tersebut dijelaskan dengan baik oleh indikator-indikatornya

4. Composite Reliability (CR)

Nilai CR yang tinggi menunjukkan konsistensi dari masing-masing indikator dalam mengukur konstruk laten. Nilai CR diharapkan lebih dari 0,7.

5. Pengujian Parameter

Pengujian Validitas Diskriminan: Indikator reflektif harus memiliki loading yang lebih tinggi untuk konstruk yang diukur dibandingkan dengan nilai loading ke konstruk lain. Nilai cross loading digunakan untuk menilai validitas diskriminan

6. Cronbach's Alpha

Digunakan untuk menilai reliabilitas semua indikator dalam model. Nilai minimal ialah 0,7, sedangkan idealnya ialah 0,8 atau 0,9

7. Implementasi dengan SmartPLS

Untuk melakukan analisis measurement model, penggunaan software SmartPLS sangat dianjurkan karena dapat menguji model SEM formatif dan reflektif dengan skala pengukuran indikator berbeda dalam satu model (Sarstedt et al., 2014).

Langkah-langkah Analisis:

- Membuat Model: Membuat model pengukuran dengan menentukan indikator reflektif dan formatif.
- Menghitung Parameter: Menghitung parameter seperti loading faktor, AVE, CR, dan cross loading.

- Menginterpretasikan Hasil: Menginterpretasikan hasil pengukuran untuk menentukan validitas dan reliabilitas indikator.

Outer model pada SEM-PLS (*Structural Equation Modeling* dengan *Partial Least Squares*) adalah komponen yang digunakan untuk mengukur dan memvalidasi model pengukuran. Outer Model disebut juga sebagai model pengukuran. Tujuan utamanya adalah untuk menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya.

Model pengukuran reflektif digunakan untuk mengukur variabel laten melalui indikator yang memiliki hubungan reflektif dengan konstruk laten. Indikator reflektif harus memiliki loading faktor yang tinggi ($> 0,7$) untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Model pengukuran formatif digunakan untuk mengukur variabel laten melalui indikator yang memiliki hubungan formatif dengan konstruk laten. Indikator formatif harus memiliki loading faktor yang tinggi ($> 0,7$) untuk memastikan validitas dan reliabilitas (Ghozali, 2014).

Validitas konvergen menunjukkan bahwa setiap indikator mewakili satu variabel laten. Ini dapat dilihat dengan menggunakan Average Variance Extracted (AVE), di mana nilai AVE harus lebih besar dari 0,5. Validitas

diskriminan menunjukkan bahwa setiap indikator tidak memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk lain. Ini dapat dilihat dengan menggunakan Cross Loading, di mana nilai cross loading harus lebih rendah daripada loading faktor. Reliabilitas komposit diukur dengan menggunakan Composite Reliability (CR), di mana nilai CR harus lebih besar dari 0,7. Selain itu, Cronbach's Alpha juga digunakan untuk menilai reliabilitas, di mana nilai minimalnya adalah 0,7.

Dengan demikian, outer model pada SEM-PLS merupakan komponen penting yang digunakan untuk memvalidasi model pengukuran dan memastikan bahwa indikator yang digunakan memiliki kevalidan dan ke reliabilitas yang baik. Dalam mengukur validitas dalam outer model PLS SEM, beberapa parameter yang digunakan adalah:

- Loading Factor
Nilai loading factor harus lebih besar dari 0,7 untuk memenuhi validitas konvergen. Indikator yang memiliki loading factor di atas 0,7 dianggap valid dalam mengukur konstruk laten.
- Average Variance Extracted (AVE)
Nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 untuk memenuhi validitas konvergen. Semakin tinggi nilai AVE, semakin baik validitas konvergen.
- Cross Loading Nilai cross loading harus lebih rendah daripada loading factor. Hal ini menunjukkan bahwa

indikator tidak memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk lain, sehingga memenuhi validitas diskriminan.

- **Fornell-Larcker Criterion**

Parameter ini digunakan untuk membandingkan AVE dengan korelasi antar variabel laten. Jika AVE lebih besar dari korelasi antar variabel laten, maka validitas diskriminan terpenuhi.

- **Reliabilitas Komposit:**

Nilai CR harus lebih besar dari 0,7 untuk memenuhi reliabilitas komposit. Semakin tinggi nilai CR, semakin baik konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruk laten.

- **Cronbach's Alpha:**

Nilai Cronbach's Alpha juga digunakan untuk menilai reliabilitas. Nilai minimalnya adalah 0,7, tetapi idealnya adalah 0,8 atau 0,9.

6.4 Inner Model

Dalam analisis SEM (*Structural Equation Modeling*), inner model adalah bagian dari model yang menggambarkan hubungan antar variabel laten yang membentuk model. Istilah model persamaan struktural digunakan untuk merujuk pada gabungan model struktural dan pengukuran.

Inner model pada Structural Equation Modeling dengan Partial Least Squares (SEM-PLS) adalah komponen yang menunjukkan hubungan antar variabel laten dalam model struktural. Inner model atau model struktural digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung.

- **Komponen Inner Model:**

Inner model terdiri dari hubungan antar variabel laten yang dibangun berdasarkan substansi teori. Ini mencakup pengukuran koefisien jalur (path coefficient) yang menggambarkan kekuatan dan signifikansi hubungan antar konstruk.

- **Evaluasi Inner Model:**

Evaluasi inner model dilakukan dengan melihat signifikansi hubungan antar konstruk/variabel. Hal ini dapat dilihat dari koefisien jalur yang harus sesuai dengan teori yang dihipotesiskan, serta signifikansinya dapat dilihat pada t-test atau Critical Ratio (CR) yang diperoleh dari prosedur bootstrapping.

- **Indikator Kecocokan Model:**

Inner model juga dievaluasi dengan menggunakan beberapa indikator kecocokan model, seperti:

✓ R-Square

Nilai R-Square yang menunjukkan koefisien determinasi pada konstruk endogen. Nilai R-Square sebesar 0,67 dikategorikan sebagai substansial, 0,33 sebagai moderat, dan 0,19 sebagai lemah.

✓ Estimasi untuk Koefisien Jalur

Nilai-nilai yang diestimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural harus dievaluasi dalam perspektif kekuatan dan signifikansi hubungan.

✓ Ukuran Pengaruh F-Square

Nilai F-Square yang menunjukkan pengaruh variabel laten prediktor (variabel laten eksogen) pada tataran struktural. Nilai F-Square sebesar 0,02 dikategorikan sebagai pengaruh lemah, 0,15 sebagai cukup, dan 0,35 sebagai kuat.

✓ Penerapan Metode Resampling

Pengujian hipotesis (β , γ , dan λ) dilakukan dengan metode resampling bootstrap. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t, dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

- Hipotesis statistik untuk outer model: $H_0: \lambda_i = 0$,
 $H_1: \lambda_i \neq 0$

- Hipotesis statistik untuk inner model: variabel laten eksogen terhadap endogen: $H_0: \gamma_i = 0$, $H_1: \gamma_i \neq 0$.

Mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung dalam Inner Model PLS SEM melibatkan beberapa langkah penting.

1. Pengaruh Langsung (Direct Effects)

Pengaruh langsung adalah pengaruh yang terjadi langsung dari variabel laten eksogen (X) ke variabel laten endogen (Y) tanpa melalui variabel perantara. Contoh: Pengaruh langsung X1 terhadap Y.

Dalam Inner Model PLS SEM, koefisien jalur (path coefficient) digunakan untuk mengukur pengaruh langsung. Koefisien ini menunjukkan besarnya pengaruh dari variabel laten eksogen ke variabel laten endogen.

Signifikansi koefisien jalur dapat dilihat melalui t-test atau Critical Ratio (CR) yang diperoleh dari prosedur bootstrapping. Jika nilai t-statistik melebihi nilai Z-score yang ditentukan (biasanya 1,96 untuk taraf signifikansi 5%), maka koefisien jalur tersebut signifikan.

2. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effects): Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh yang terjadi melalui

variabel perantara. Contoh: Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z melalui Y.

Pengaruh tidak langsung dapat dihitung dengan mengalikan koefisien jalur antara variabel laten eksogen dan variabel perantara, lalu mengalikan hasilnya dengan koefisien jalur antara variabel perantara dan variabel laten endogen.

3. Total Pengaruh:

Total pengaruh (total effects) adalah hasil penambahan pengaruh langsung dan tidak langsung. Jika tidak ada variabel perantara, maka total pengaruh sama dengan pengaruh langsung.

4. Evaluasi Model

- R-Square:

Nilai R-Square menunjukkan koefisien determinasi pada konstruk endogen. Nilai R-Square sebesar 0,67 dikategorikan sebagai substansial, 0,33 sebagai moderat, dan 0,19 sebagai lemah.

- F-Square:

Nilai F-Square digunakan untuk mengetahui ukuran pengaruh variabel laten prediktor (eksogen) pada tataran struktural. Nilai F-Square sebesar 0,02

dikategorikan sebagai pengaruh lemah, 0,15 sebagai cukup, dan 0,35 sebagai kuat.(Hulland, 1999).

Dengan demikian, mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung dalam Inner Model PLS SEM melibatkan estimasi koefisien jalur, signifikansi koefisien jalur, estimasi pengaruh tidak langsung, dan evaluasi model dengan menggunakan R-Square dan F-Square. Menilai signifikansi koefisien jalur dalam Inner Model PLS SEM melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah cara-cara untuk menilai signifikansi koefisien jalur:

- Menggunakan Bootstrapping:

PLS SEM menggunakan prosedur bootstrapping untuk menilai signifikansi koefisien jalur. Bootstrapping melibatkan pengulangan analisis dengan sampel yang diacak ulang berulang kali. Dari hasil bootstrapping, nilai t-statistik atau Critical Ratio (CR) dapat dihitung untuk menilai signifikansi koefisien jalur.

- Menghitung T-Statistik atau Critical Ratio (CR):

Setelah melakukan bootstrapping, nilai t-statistik atau CR dihitung untuk setiap koefisien jalur. Jika nilai t-statistik melebihi nilai Z-score yang ditentukan (biasanya 1,96 untuk taraf signifikansi 5%), maka koefisien jalur tersebut signifikan.

- Menginterpretasikan Hasil:

Hasil t -statistik atau CR digunakan untuk menginterpretasikan signifikansi koefisien jalur. Jika hasilnya signifikan, maka hubungan antar konstruk laten yang diwakili oleh koefisien jalur tersebut memiliki pengaruh yang signifikan.

- Menggunakan SmartPLS:

Dalam menggunakan SmartPLS, Anda dapat melihat hasil signifikansi koefisien jalur langsung di dalam output analisis. SmartPLS akan menampilkan nilai t -statistik atau CR untuk setiap koefisien jalur, sehingga memudahkan peneliti untuk menilai signifikansi (Leguina, 2015).

BAB VII

PENGARUH PENERAPAN KONSEP *BLUE ECONOMY* TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT WILAYAH PESISIR

Peran konsep *blue economy* salah satunya adalah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan, mengurangi pencemaran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir. Konsep *blue economy* telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi mereka. Sebagai contoh, sektor perikanan dan kelautan Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dan ini dapat digunakan sebagai strategi pengembangan ekonomi maritim (Puspitasari et al., 2023).

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memungkinkan pengembangan ekonomi biru. Pendekatan Blue Economy juga dapat membantu pemerintah dengan membuat kebijakan yang mengintegrasikan konsep ekonomi biru ke dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pendekatan ini juga dapat mengurangi perbedaan antara kebijakan dan

implementasi pembangunan berbasis sumber daya alam dan lingkungan. Konsep ini juga dapat mengurangi perbedaan antara pengelolaan lingkungan dan pendapatan ekonomi (Rahim et al., 2024).

Penerapan konsep *blue economy* di wilayah pesisir memberikan dampak pada pembangunan nasional, serta basis utama untuk kemandirian dan ketahanan pangan nasional. *Blue economy* mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan porsi besar bagi masyarakat apabila pemerintah dapat memberikan pemberdayaan kepada penduduk yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir untuk menikmati sumber daya sehari-hari (Sofyaningrum et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang telah kami dilakukan diperoleh bahwa faktor internal, faktor eksternal, dan penerapan *konsep blue economy* berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Meranti, sedangkan variabel strategi pemberdayaan masyarakat dan penerapan konsep *green economy* tidak berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Meranti. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa seluruh variabel independent (faktor internal, faktor eksternal dan strategi pemberdayaan masyarakat) berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap

penerapan konsep *blue economy* dan *green economy* di wilayah pesisir Kepulauan Meranti.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, konsep Blue Economy diharapkan dapat menyadarkan pemerintah untuk secara aktif mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir. Hubungan antara peran pemerintah dan masyarakat pesisir sangat diharapkan dan diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan budaya maritim, demi mewujudkan kejayaan dan kesejahteraan sumber daya laut serta menanamkan nilai-nilai kearifan lokal terhadap sumber daya laut yang pada dasarnya memiliki keunggulan komparatif (Prayuda, 2019).

Selain itu, kami juga menemukan bahwa penerapan konsep *blue economy* dapat memediasi hubungan tidak langsung antara faktor eksternal dan strategi pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat artinya faktor eksternal dan strategi pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Meranti. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah pesisir kepulauan Meranti konsep *blue economy* memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kepulauan Meranti karena cocok dengan kondisi wilayah pesisir itu sendiri. Dengan penerapan konsep *blue economy* maka pembangunan ekonomi yang berfokus pada

pemanfaatan sumber daya laut dapat terjaga dan berkelanjutan.

Menurut penelitian Wijayanti & Ramlah (2022) Semakin tinggi penerapan konsep Blue Economy, semakin meningkat pula pendapatan masyarakat di Kepulauan Seribu. Konsep Blue Economy memiliki indikator seperti Investasi Tinggi, Karbon Rendah, dan Pengurangan Limbah. Prinsip-prinsip Blue Economy yang memanfaatkan bahan baku alam secara efisien dan tanpa menghasilkan limbah memiliki dampak sosial yang signifikan. Penerapan ekonomi hijau akan meningkatkan nilai ekonomi tanpa pemborosan, membuka peluang usaha baru, dan sejalan dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian lain (Resta Setyawati et al., 2021) menunjukkan bahwa prinsip *blue economy* telah digunakan untuk membangun potensi kekuatan di Sabang, Kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Sabang sangat penting untuk pelestarian alam, dan Blue Economy juga telah memberikan efek yang lebih besar pada kesejahteraan masyarakat pesisir di Sabang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep Blue Economy memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, karena konsep ini dianggap salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi dan kelestarian laut.

Konsep *Blue Economy* dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengoptimalan sumber daya perairan, seperti industri perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan. *Blue Economy* berfokus pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, yang dapat menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ilma, 2014).

Melalui penerapan konsep *Blue Economy* maka masyarakat wilayah pesisir dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya laut. Hal ini dapat membuka peluang baru dalam bisnis perikanan dan kelautan, serta meningkatkan pendapatan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Konsep *Blue Economy* tidak hanya melibatkan penangkapan ikan, tetapi juga pengembangan hasil olahan produk perikanan dan kelautan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara mengembangkan kerajinan tangan dan produk olahan laut yang unik, sehingga menarik wisatawan lokal dan internasional (Zainul Bahri et al., 2023).

Selain itu *Blue Economy* menekankan pentingnya mengelola limbah secara efektif. Dengan demikian, limbah dari kegiatan perikanan tidak mencemari lingkungan, sehingga meningkatkan kesehatan ekosistem laut dan mempertahankan produktivitas laut, yang pada akhirnya

meningkatkan pendapatan melalui kegiatan perikanan yang berkelanjutan (Hutajulu et al., 2024).

BAB VIII

PENGARUH PENERAPAN KONSEP *GREEN ECONOMY* TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT WILAYAH PESISIR

Green economy dapat meningkatkan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, dan mempertahankan daya dukung serta kualitas lingkungan hidup., karena pertumbuhan ekonomi memungkinkan inovasi dan kreasi baru dalam bidang yang sudah ada dan sedang berkembang. Karena itu, *green economy* disebut sebagai konsep pembangunan ekonomi yang tepat. Dengan munculnya *green economy*, kebutuhan untuk membersihkan limbah penggembala dan ternak dihidupkan kembali. Ini dilakukan untuk menjaga lingkungan dan memberi ruang untuk investasi pertanian (Bergius et al., 2020). Dengan kata lain, *green economy* Green economy adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan manusia dan kesetaraan sosial, serta secara signifikan mengurangi risiko lingkungan.

Dalam penelitian yang dilakukan Wijayanti & Ramlah (2022) ditemukan bahwa Semakin tinggi penerapan konsep Green Economy, semakin meningkat pula pendapatan masyarakat di Kepulauan Seribu. Konsep Green Economy memiliki indikator seperti memberikan kesempatan kepada

pengusaha, memberikan keuntungan bagi perusahaan (Model Ekonomi Baru) dengan lingkungan yang bersih dan efisien. Konsep ini merupakan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kebijakan lama yang tidak mendukung solusi jangka panjang dan ekosistem. Oleh karena itu, Green Economy dianggap sebagai solusi terbaik bagi para pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada hasil penelitian lain tentang Analisis Pembangunan Perkotaan dalam Perspektif Green Economy (Studi Kasus: Megaprojek Reklamasi CPI Makassar) (Aswandi & Saudi, 2023) ditemukan Terjadi penurunan signifikan pendapatan nelayan sebelum dan selama pembangunan megaprojek reklamasi CPI Makassar. Setelah reklamasi, pendapatan nelayan mengalami penurunan drastis, yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat pesisir. Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa seluruh desa wisata yang melakukan pengelolaan dengan menerapkan konsep *Green Economy* memberikan dampak yang signifikan pada pendapatan pelaku usaha wisata, termasuk pengelola desa wisata (Nurany, 2022) (Noviarita et al., 2021).

Namun, dalam penelitian yang kami lakukan konsep *green economy* tidak berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir

Kabupaten Meranti hal ini karena di wilayah pesisir Kepulauan Meranti lebih banyak yang bekerja sebagai nelayan daripada peternak atau pengembala sehingga penerapan konsep *blue economy* lebih memberikan dampak signifikan bagi mereka dalam meningkatkan pendapatan mereka. Selain ini di Kepulauan Meranti tidak banyak masyarakat yang memiliki atau bekerja di tempat wisata, dimana ditempat wisata merupakan salah satu tempat yang perlu untuk diterapkan konsep *green economy*. Selain itu konsep *green economy* juga belum dapat memediasi pengaruh faktor internal, eksternal dan strategi pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Meranti. Penelitian ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Wijayanti (2023) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan atas pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan masyarakat yang di moderasi oleh penerapan konsep *green economy*.

Berdasarkan pada hasil analisis ditemukan bahwa konsep *green Economy* belum dapat menjembatani antara faktor internal, faktor eksternal dan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir karena konsep *green economy* adalah bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, serta mengurangi risiko lingkungan. Selain itu,

konsep ini dapat menjembatani antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, serta menghemat sumber daya alam. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa konsep *green economy* berpengaruh terhadap kondisi pendapatan atau kesejahteraan masyarakat seperti Terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa Penerapan konsep *green economy* di sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Selain itu, penelitian oleh Sunarti (2012) menunjukkan bahwa Pengembangan pariwisata yang berfokus pada lingkungan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan peluang kerja baru..

Konsep *green economy* melibatkan pengembangan dan penerapan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan serta peningkatan kualitas hidup manusia melalui penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan redistribusi kekayaan yang lebih adil. Implementasi *green economy* dapat menghasilkan manfaat seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Susila & Hukom, 2023).

Penggunaan *green economy* memiliki banyak manfaat, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan kualitas udara, pembangunan infrastruktur yang ramah

lingkungan, peningkatan ketersediaan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing ekonomi. *Green economy* dapat bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan jika diterapkan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, penerapan *green economy* juga dapat membantu mengatasi tantangan perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, penerapan *green economy* tidaklah mudah dan tidak cepat. Untuk memastikan bahwa *green economy* dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Susila, 2023).

Secara makro konsep *green economy* dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, terutama dalam sektor energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, dan industri berkelanjutan. Konsep *green economy* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, serta mengurangi resiko kerusakan lingkungan selain itu penerapan *green economy* dapat meningkatkan pengembangan energi bersih, seperti energi matahari dan angin, yang dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca (Zainul Bahri et al., 2023).

Green economy berupaya mendorong pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja melalui pergeseran investasi menuju teknologi bersih, modal alam, sumber daya manusia, dan institusi sosial. Konsep ini menekankan pentingnya pergeseran investasi publik dan swasta sebagai instrumen kunci untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan sosial, didukung oleh reformasi kebijakan yang relevan. Dalam *green economy*, aspek sosial menjadi prioritas utama untuk transformasi investasi. (Fedrigo-Fazio & Brink, 2012).

Menurut *Global Green Growth Institute* (2015), diharapkan pertumbuhan *green economy* di Indonesia dapat mencapai lima hasil yang secara bersamaan membentuk kerangka pertumbuhan *green economy*, yaitu: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pertumbuhan yang inklusif dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, ekosistem yang sehat dan produktif yang memberikan layanan lingkungan, serta pengurangan emisi gas rumah kaca (Anwar, 2022).

Untuk mengaplikasikan *green economy*, banyak elemen yang perlu terlibat, mulai dari masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha, serta juga tidak terlepas dari pihak yang fokus dalam aktivitas yang mempengaruhi lingkungan. Berbagai pihak perlu dididik dan mengambil tindakan untuk menekan dampak negatif kerusakan

lingkungan yang mengancam kesejahteraan manusia, ekosistem, dan keberlangsungan masyarakat (Pujiati, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, R. N., Majid, J., & Suhartono, S. (2020). Carbon Tax: Alternatif Kebijakan Pengurangan External Diseconomies Emisi Karbon. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 48–66.
- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
- Aswandi, K., & Saudi, N. D. S. (2023). Analisis Pembangunan Perkotaan dalam Perspektif Green Economy (Studi Kasus: Megaproyek Reklamasi CPI Makassar). *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 237–247.
- BAPPENAS. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap*. 2, 3145374.
- Bergius, M., Benjaminsen, T. A., Maganga, F., & Buhaug, H. (2020). Green economy, degradation narratives, and land-use conflicts in Tanzania. *World Development*, 129, 104850.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Chin, W. W., & Dibbern, J. (2009). An introduction to a permutation based procedure for multi-group PLS analysis: Results of tests of differences on simulated data and a cross cultural analysis of the sourcing of information system services between Germany and the USA. In *Handbook of partial least squares: Concepts, methods and applications* (pp. 171–193). Springer.
- Dahuri, R. (2001). Pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 17(2), 139–171.
- Dian, A., Adnan, I., Hasana, S., & Assidiq, M. (2023). Implementasi Konsep Blue Economy Di Indonesia Dengan. *Sensistek*, 6(2), 134–140.

- GGGI, G. (2015). *Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia*.
- Ghozali, I. (2014). SEM metode alternatif dengan menggunakan Partial Least Squares (PLS). *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Graziano, M., Alexander, K. A., Liesch, M., Lema, E., & Torres, J. A. (2019). Understanding an emerging economic discourse through regional analysis: Blue economy clusters in the US Great Lakes basin. *Applied Geography*, 105, 111–123.
- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*. Springer Nature.
- Hayati, atul, & Anggadha Ratno, F. (n.d.). *The Urgency of Blue and Green Economy, Internalization, And Infrastructure, In The SDGS* (Vol. 3).
- Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. *Strategic Management Journal*, 20(2), 195–204.
- Humairoh, T. L., Setyaningrum, I., & Tanaya, O. (2024). Keberlanjutan Blue Economy Melalui Kontribusi Industri Ikan Tangkap Dan Budidaya Ikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 3443–3452.
- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P., Fitriyana, F., Mudjiyanti, R., Maichal, M., Boari, Y., & Laksono, R. D. (2024). *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Ilma, A. F. N. (2014). Blue economy: kesimbangan perspektif ekonomi dan lingkungan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 14(1).
- Intyas, C. A., Susilo, E., & Indrayani, E. (2022). *Modal Sosial dan Kemiskinan Nelayan*. Universitas Brawijaya Press.
- Kalinowski, T. (2021). The politics of climate change in a neo-developmental state: The case of South Korea. *International Political Science Review*, 42(1), 48–63.
- Kamal, A., ASS, S. B., & Susanti, J. (2023). Analisis Efektivitas Dana Desa Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Inklusi Sosial Secara Berkelanjutan Pada Desa Nelayan Tradisional Di Kabupaten Takalar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 6422–6440.
- Larasati, S., & Winarno, W. (2023). Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Penduduk Kelurahan Tugu Selatan Jakarta Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 415–424.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2715>
- Leguina, A. (2015). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Taylor & Francis.
- Lolowang, J., Pangemanan, L. R. J., & Memah, M. Y. (2022). Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara (Social Economic Characteristics Coastal Community in Kema District North Minahasa Regency). *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)*, 3(4), 541–547.
- Makmun. (2020). Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan. In *Jurnal Ekonomi* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–17).
- Mariana, K. (2023). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Prosiding*.

- Misdawita, M. (2023). Strengthening The Household Economy Through The Role Of Women On The Coast Of The Rokan River Rokan Hilir Regency. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(2), 403–411.
- Misdawita, M., & Utami, B. C. (2022). Analysis of Factors Affecting the Income of Working Women. *International Journal of Management and Business Applied*, 1(2).
- Mokalu, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur). *Governance*, 1(2).
- Mubarok, D. (2023). Penerapan Green Economy Dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 6(2), 31–52.
- Nasution, M. (2019). Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur The Potential And Challenges Of The Blue Economy In Supporting Economic Growth In Indonesia: Literature Review. In *Jurnal Budget* (Vol. 7, Issue 2).
- Novianti, R., & Maria, I. (2019). *Resiliensi Ibu dari Keluarga Ekonomi Lemah di Kabupaten Kepulauan Meranti (Mothers ' Resilience of Weak Economic Family in the District of Kepulauan Meranti)*. 2(2), 67–73.
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep Green Economy Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Wisata di Provinsi Lampung dan Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 564–572.
- Nugraha, R., Varlitya, C. R., Judijanto, L., Adiwijaya, S., Suryahani, I., Murwani, I. A., Sopian, Y., Boari, Y., Kartika, T., & Fatmah, F. (2024). *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Nur, M. I. (2019). Gambaran Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Khususnya Nelayan. *Makasar: Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin*.
- Nurany, F. (2022). Green Economy in the Development of Miru Tourism Village, Kedamean District, Gresik Regency. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 7(2), 63–73.
- Pramudyanto, B. (2014). Pengendalian pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(4), 21–40.
- Prayuda, R. (2019). Strategi Indonesia dalam implementasi konsep Blue Economy terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di era masyarakat ekonomi Asean. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46–64.
- Pujiati, D. (2022). *Penerapan Pilar Green Economy Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Ngringinrejo Bojonegoro*. IAIN Ponorogo.
- Purba, J. (2002). *Pengelolaan lingkungan sosial*. Yayasan Obor Indonesia.
- Puspitasari, D., Chasanah, A. N., & Wardhani, M. F. (2023). Strategi Peningkatan Ketahanan Ekonomi Untuk Perikanan Berkelanjutan Berbasis Konsep Blue Economy. *Jurnal Praktik Akuntansi Modern*, 5(4).
- Rahadi, D. R. (2023). *Pengantar Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Lentera Ilmu Madani.
- Rahim, A., Hastuti, D. R. D., & Malik, A. (2024). *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Rahmasari, L. (2017). Analisis Pola Konsumsi, Kewirausahaan Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Nelayan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 1, 65–75.
- Resta Setyawati, L., Danur Cahya, D., Dian Novarianti, A., Djoko Said, B., Keamanan Nasional, F., Pertahanan, U. R., Manajemen dan Bisnis, F., & Nusa Putra, U. (2019). *Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Kota Sabang*.

- Ridlo, M. A., & Yuliani, E. (2018). Mengembangkan kawasan pesisir pantai Kota Semarang sebagai ruang publik. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 15(1).
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir. *Sosio Informa*, 3(3).
- Sardar, Z., & Hr, M. N. (2016). Kesejahteraan dalam perspektif islam pada karyawan bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(5), 315443.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., Smith, D., Reams, R., & Hair Jr, J. F. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): A useful tool for family business researchers. *Journal of Family Business Strategy*, 5(1), 105–115.
- Sebayang, S. A. M. (2018). Analisis structural equation modelling (sem) terhadap alih fungsi lahan pertanian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(2), 169–184.
- Seftiani, S. (2024). *Praktik Ekonomi Hijau di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setyawati, N. W., & Ningrum, E. P. (2018). Potensi Peran Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan. *Journal FAME: Journal Food and Beverage, Product and Services, Accomodation Industry, Entertainment Services*, 1(1).
<https://doi.org/10.30813/fame.v1i1.1323>
- Sofyaningrum, R., Maulana, A. I., Sistiyaningrum, K., & Alfian, F. (2023). Blue Economy and Green Economy: Ecocritical Study of Kompas Short Stories Collection Keluarga Kudus. *SUAR BETANG*, 18(1), 105–121.
<https://doi.org/10.26499/surbet.v18i1.475>
- Southgate, D., & Disinger, J. F. (2019). *Sustainable resource development in the third world*. Routledge.
- Statistik, B. P. (2021). Berita resmi statistik. *Bps. Go. Id*, 27, 1–52.
- Sunarti, E. (2012). *Tekanan ekonomi dan kesejahteraan objektif keluarga di perdesaan dan perkotaan*.

- Susila, W., & Hukom, A. (2023). Potensi Implementasi Green Economy Di Kalimantan Tengah. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 239–248.
- Susmoro, H. (2019). *The Spearhead of Sea Power*. Pandiva Buku.
- Syahrin, M. A., Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2022). Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 95–105.
<https://doi.org/10.46773/v1i2.395>
- Tegar, D. R., & Saut Gurning, R. (2018). Development of Marine and Coastal Tourism Based on Blue Economy. In *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research* (Vol. 2, Issue 2).
- Thomas, T., Christiaensen, L., Do, Q.-T., & Trung, L. D. (2010). Natural disasters and household welfare: evidence from Vietnam. *World Bank Policy Research Working Paper*, 5491.
- Wahyudin, Y. (2003). Sistem sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. *Makalah Disampaikan Pada Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Tanggal*, 5.
- Wati, A. S., Ramadhani, F. B., Dedyanti, M. K., Pandin, M. Y. R., & Biru, P. (2024). *Pengaruh konsep blue economy dan blue growth terhadap integrated reporting pada pt dharma samudera fishing industries tbk tahun 2020-2022*. 06(3), 116–126.
- Wibisono, A., Anwar, M., & Kirono, I. (2015). Stuctural Equation Modeling Partial Least Square (SEM PLS) Untuk Mengetahui Kinerja Karyawan Pada PT. Dempo Laser Metalindo Surabaya. *J Statistika*, 7, 19.
- Wijayanti, A., & Ramlah, R. (2022). Pengaruh Concept Blue Economy Dan Green Economy Terhadap Perekonomian Masyarakat Kepulauan Seribu. *Owner*, 6(3), 1732–1743.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.906>
- Wirata, G. (2022). *Kebijakan Sosial. Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan*. CV. Pena Persada.

- Y. A. Wahyuddin, Raka Maypangestu Hidayat, & Tri Ridho Verdiansyah. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN BLUE ECONOMY INDONESIA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA ERA JOKO WIDODO. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2(2), 70–87. <https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.49>
- Zahari, & Sudirman. (2017). Green Ekonomi. file:///C:/Users/User/Downloads/77730-ID-green-economy-konsep-impelentasi-dan-per.pdf
- Zainul Bahri, S. E., Aprilianti, D. R. V., & SSTP, M. E. (2023). *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy*. Nas Media Pustaka.

INDEKS

B

Blue Economy, i, 3, 23, 24, 26, 52, 54, 55, 56, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72

G

Green Economy, i, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

I

Indikator, 7, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 46

K

Kesejahteraan Masyarakat, 68, 71

L

Loading Factor, 44

P

Pendidikan, 9, 18, 21, 28, 67, 69, 76, 77

Peningkatan Pendapatan, i

Pesisir, i, 13, 15, 18, 20, 67, 69, 75

PLS-SEM, 40, 66, 67, 69, 70

R

Reliabilitas, 41, 44, 45

S

SmartPLS, 37, 40, 42, 51

Structural Equation Modeling (SEM), 38, 40

W

Wilayah Pesisir, i

GLOSARIUM

AVE (Average Variance Extracted)

Nilai yang digunakan untuk menentukan kualitas indikator. Nilai AVE yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki convergent validity yang baik.

Blue Economy

Konsep ekonomi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan berkelimpahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan laut.

Green Economy

Konsep ekonomi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkelimpahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Hambatan

Kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep blue economy dan green economy, seperti biaya tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Indikator

Variabel yang digunakan untuk mengukur konstruk laten. Indikator dapat berupa data metrik atau non-metrik

Loading factor

Nilai yang menunjukkan seberapa baik indikator menggambarkan konstruk laten. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa indikator tersebut efektif dalam mengukur konstruk laten.

Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Konstruk laten

Variabel yang tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat diukur melalui indikator-indikator yang relevan

Pengelolaan Berkelanjutan

Cara pengelolaan sumber daya laut yang mempertimbangkan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem laut.

Peningkatan Pendapatan

Kenaikan pendapatan masyarakat yang dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk penerapan konsep blue economy dan green economy

Pesisir

Wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan.

PLS-SEM

Model yang menggunakan komponen-komponen yang dipilih untuk mewakili variabel-variabel laten, berbeda dengan SEM yang berbasis kovarian yang menggunakan kovarian untuk mewakili hubungan antar variabel

Reliabilitas

Ukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa baik indikator-indikator mengukur konstruk laten. Indikator yang

memiliki reliabilitas baik akan memiliki nilai yang konsisten dalam mengukur konstruk laten.

SmartPLS

Salah satu software yang populer digunakan untuk menganalisis PLS-SEM. SmartPLS menyediakan berbagai fitur untuk membantu peneliti dalam menganalisis data dan menguji hipotesis

Solusi

Cara mengatasi hambatan, seperti dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Sumber Daya Alam

Sumber daya yang terkait dengan lingkungan, seperti hutan, air, dan tanah.

Sumber Daya Laut

Sumber daya yang terkait dengan laut, seperti perikanan, energi laut, dan pariwisata laut.

Structural Equation Modeling (SEM)

Model yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, serta hubungan antara konstruk laten satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung

PROFIL PENULIS



Misdawita, S.Si., M.S.E.

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Penulis lahir di Sedinginan tanggal 04 Oktober 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Matematika Universitas Indonesia dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menekuni bidang Statistika Ekonomi, Ekonomi Pembangunan khususnya di wilayah Pesisir , Ekonomi Syariah, Ekonomi Energi dan Ekonometrika.

PROFIL PENULIS



Putri Asrina, S.E., M.Ec

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Penulis lahir di Pekanbaru tanggal 21 Januari 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Riau pada Tahun 2015 dan melanjutkan Pendidikan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada pada Tahun 2018. Penulis menekuni bidang, Ekonomi Syariah, Ekonomi Moneter dan Internasional.

PROFIL PENULIS



M. Rizwan, B.Ec., M.Ec

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Penulis lahir di Pekanbaru tanggal 12 November 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia pada Tahun 2012 dan melanjutkan Pendidikan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia pada Tahun 2014.